

PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI PENERAPAN COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI LOKAL

Inara Mirajani¹, Johan Immanuel Aritonang², Siska Damayanty³, Sahadi Humaedi⁴, Rudi S. Darwis⁵, Eva Nuriyah Hidayat⁶, Santoso Tri Raharjo⁷, Meilanny Budiarti Santoso⁸

^{1,2,3}Program Studi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran
^{4,5,7,8}Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran
⁶Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran

*Corresponding author

Email: inara20001@mail.unpad.ac.id

No. doi: 10.24198/focus.v6i2.52787

ABSTRAK

Desa wisata merupakan salah satu strategi pengembangan ekonomi lokal yang telah banyak diterapkan di berbagai negara. Pengembangan desa wisata tidak hanya melibatkan aspek pariwisata, tetapi juga perlu memperhatikan pemberdayaan masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam pengembangan desa wisata adalah *community development*, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan mengoptimalkan sumber daya lokal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan dampak penerapan *community development* dalam pengembangan desa wisata terhadap peningkatan ekonomi lokal. Melalui tinjauan literatur, studi ini akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar *community development*, strategi implementasi, dan pendekatan yang digunakan dalam konteks pengembangan desa wisata. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa penerapan *community development* dalam pengembangan desa wisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi lokal. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha lokal, dan pemanfaatan sumber daya lokal, desa wisata dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Kata-kata kunci: Desa wisata, pengembangan komunitas, ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, sumber daya lokal, pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

Village tourism is one of the local economic development strategies that has been widely implemented in various countries. The development of tourist villages not only involves aspects of tourism, but also needs to pay attention to the empowerment of local communities. The method used in the development of tourist villages is *community development*, which aims to increase community participation in the development and optimize local resources. This study aims to analyze the concept and impact of the application of *community development* in the development of tourist villages on improving the local economy. Through a literature review, this study will explain the basic principles of *community development*, implementation strategies, and approaches used in the context of tourism village development. The results of the literature review show that the application of *community development* in the development of tourism villages has great potential in improving the local economy. By involving local communities in the decision-making process, skills training, local business development, and utilization of local resources, tourist villages can become a sustainable source of income for local communities.

Keywords: tourism village, community development, local economy, community participation, local resources, community empowerment

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi fokus perhatian dunia, dan fokusnya adalah pengembangan destinasi untuk mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu lebih memperhatikan keberlanjutan destinasi wisata, kepentingan masyarakat dan dampak lingkungan tempat destinasi tersebut berada.

Pengertian Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri Indonesia yang memiliki potensi dan peluang untuk dikembangkan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pariwisata merupakan sektor terbesar dalam perekonomian dan memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian suatu negara, pariwisata merupakan sumber pendapatan yang penting bagi suatu negara. Ekonomi dan pariwisata memiliki hubungan yang sangat erat karena merupakan satu kesatuan. Berkaitan dengan pariwisata di Indonesia tentunya banyak daerah yang memiliki pesona wisata yang sangat indah, jika ingin pergi ke suatu objek wisata sangat layak untuk dikunjungi. Keberadaan sumber daya alam sangat mendukung proses pengembangan pariwisata di daerah sejalan dengan sumber daya alam yang dimilikinya.

Menurut Yoeti (1997:63), pariwisata adalah suatu perjalanan, suatu perjalanan dalam jangka waktu tertentu, dari satu tempat ke tempat lain, bukan untuk tujuan berbisnis atau mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi hanya untuk seorang konsumen. , Nikmati perjalanan dan penuhi semua keinginan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan sementara yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dari satu

tempat ke tempat lain dengan tujuan bukan untuk bekerja.

Menurut definisi United Nations World Tourism Organization, pariwisata berkelanjutan mengacu pada pengembangan pariwisata yang sepenuhnya mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, dengan memenuhi kebutuhan wisatawan, pariwisata, lingkungan dan masyarakat lokal, termasuk aspek-aspek berikut : (1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan menjaga proses ekologis yang penting dan melindungi alam dan keanekaragaman hayati, (2) menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional, serta mendorong pemahaman dan toleransi antar budaya, (3) Menjamin kelangsungan usaha ekonomi untuk keberlanjutan jangka panjang, manfaat sosial-ekonomi yang adil bagi semua pemangku kepentingan, termasuk kesempatan kerja, pendapatan berkelanjutan dan pelayanan sosial bagi masyarakat lokal, dan pengentasan kemiskinan. Salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah melalui desa wisata.

Dampak globalisasi Terhadap Budaya Lokal

Perkembangan globalisasi berdampak pada kajian pembangunan masyarakat di tingkat dunia dan di Indonesia. Kajian yang dikemukakan oleh Ife (2013) adalah bahwa pengembangan masyarakat membutuhkan perspektif yang lebih luas untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin cepat dan tidak pasti, yang meliputi sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, spiritual dan berbagai

penerapannya dalam berbagai aspek yang lebih detail. Penulis mencoba untuk menggambarkan salah satu aspek perkembangan masyarakat, yaitu perkembangan budaya, dari perspektif yang berbeda. Peningkatan budaya sangat penting, karena pada kenyataannya banyak ditemukan permasalahan dalam pelestarian budaya asli Indonesia dan keberadaan budaya asli. Hal ini pula yang telah dinyatakan oleh Koentjaraningrat (1990) puluhan tahun lalu yang menjelaskan bahwa laju modernisasi dan pembangunan di segala bidang, menyebabkan terjadinya pertumbuhan yang pesat di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pergeseran nilai sosial budaya, ekonomi dan politik, telah memporak-porandakan sejumlah besar nilai tradisional yang dahulu merupakan simpul kekuatan yang mengantarkan masyarakat mencapai survive dari waktu ke waktu.

Dalam konteks globalisasi budaya, Ife (2013) berpendapat bahwa budaya lokal penting untuk kelanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena ada kecenderungan pergeseran budaya, yang berimplikasi pada krisis identitas di seluruh dunia. Di sisi lain, banyak fenomena dan praktik komodifikasi dan komersialisasi budaya yang berlebihan akibat globalisasi budaya. Dalam konteks globalisasi budaya saat ini, pengembangan masyarakat perlu diteliti dan dipraktikkan guna menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat dan budayanya, termasuk tantangan eksistensi budaya lokal.

Potensi Pariwisata Di Indonesia

Sektor pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia dan menjadi penyumbang devisa utama. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) dalam laporan *Tourism Trends and Policies 2022* menyebutkan pada 2019, sektor pariwisata menyumbang 5,0% dari pendapatan

domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun, hantaman pandemi Covid-19 di 2020 mengakibatkan turunnya kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 56% yaitu menjadi hanya 2,2% dari total ekonomi. Kebijakan restriksi di berbagai negara guna mengendalikan penyebaran virus Covid-19 telah menyebabkan kunjungan wisman menurun tajam dari 16,1 juta di tahun 2019 menjadi hanya 4,0 juta di tahun 2020. Pada tahun 2021, kunjungan wisman bahkan kembali menurun tajam, hanya mencapai 1,5 juta kunjungan, atau turun sebesar 61,6 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2020. Penurunan signifikan kunjungan wisman tersebut turut berdampak besar pada sektor-sektor yang terkait erat, seperti akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman (restoran), serta sektor transportasi.

Imbas keterpurukan sektor pariwisata di masa pandemi juga dirasakan langsung oleh lebih dari 34 juta masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor wisata dan ekonomi kreatif kala itu. Berbagai dukungan pemerintah melalui instrumen APBN pun dikerahkan untuk mendorong percepatan pemulihan industri pariwisata nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah program, antara lain pengembangan desa wisata, bantuan atau insentif ke pelaku usaha pariwisata, sertifikasi tempat-tempat wisata sesuai standar Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE), dan penyediaan fasilitas vaksinasi Covid-19 di lokasi wisata.

Pariwisata domestik Indonesia berangsur pulih dengan meningkatnya jumlah perjalanan wisnus tahun 2022 sebesar 19,82 persen dibandingkan tahun 2021, serta tumbuh 1,76 persen dibandingkan tahun 2019. Perjalanan wisnus tertinggi terjadi pada Maret 2022 yaitu sebesar 80,23 juta perjalanan. Sektor wisata domestik Indonesia pada 2022 konsisten membaik seiring dengan tren penularan COVID-19 yang semakin

menurun. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan jumlah perjalanan wisnus (wisnus) sebesar 19,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 734,86 juta perjalanan wisnus selama periode 2022. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19 (2019), perjalanan wisnus tumbuh 1,76 persen. Maret 2022 menjadi periode dengan jumlah perjalanan wisnus tertinggi yaitu sebesar 80,23 juta perjalanan. Besaran ini relatif lebih tinggi 1,5 juta perjalanan dibandingkan jumlah perjalanan wisnus tertinggi sebelum pandemi COVID-19 (Juni 2019). Secara umum, pariwisata domestik di Indonesia masih didominasi oleh arus perjalanan wisata di Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan dengan 76,54 persen perjalanan wisnus berasal dari Pulau Jawa. Demikian juga dengan daerah tujuan wisata, dimana sebanyak 75,49 persen dari total perjalanan wisnus berada di Pulau Jawa. Jumlah perjalanan wisnus secara nasional mengalami pertumbuhan positif dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19. Namun, pemulihan wisatawan domestik ini baru terlihat di beberapa provinsi, salah satunya adalah Jawa Timur. Jumlah perjalanan yang berasal dari Jawa Timur mengalami pertumbuhan paling signifikan dibandingkan tahun 2019 (145,16 persen). Selain itu, Jawa Timur juga tercatat sebagai provinsi tujuan dengan peningkatan kedatangan wisatawan domestik paling besar pada 2022, yaitu 134,61 persen dibandingkan 2019.

Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan tercapainya keadilan sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Selain itu keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan, serta memungkinkan pengembangan desa wisata memiliki nilai budaya tanpa merusak nilai budaya. Inskeep (1991)

percaya bahwa desa wisata adalah bentuk pariwisata di mana sekelompok kecil wisatawan tinggal di atau dekat kehidupan tradisional atau desa terpencil untuk belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

Menurut Nuryanti (1992), desa wisata dapat diartikan sebagai suatu bentuk penggabungan antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang terjalin erat dengan tata cara dan tradisi yang ada. Penting untuk dicatat bahwa elemen utama dalam konsep desa wisata adalah (1) akomodasi, yang mencakup bagian dari tempat tinggal penduduk lokal dan/atau unit-unit perumahan yang berkembang sesuai dengan gaya hidup penduduk, serta (2) atraksi, yang mencakup kehidupan sehari-hari penduduk lokal dan keindahan lokasi desa yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi secara aktif. Contohnya, wisatawan dapat mengikuti kursus tari, bahasa, lukis, dan kegiatan khusus lainnya. Ditinjau menurut pendapat Nuryanti Kemenpar bahwasanya desa wisata merupakan daerah tujuan ataupun destinasi pariwisata yang mana berupa gabungan dari daya tarik wisata, amenitas, akomodasi, aksesibilitas, dan hal lainnya yang menyangkut kegiatan pariwisata dimana dikemas dan disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat dengan mengacu pada tata cara serta tradisi yang berlaku di suatu daerah tersebut. Tujuan dari adanya desa wisata salah satunya untuk memperkenalkan budaya desa secara lebih dekat serta dapat meningkatkan minat kunjungan dan lama tinggal wisatawan serta menggerakkan perekonomian masyarakat di atas. Hadiwijoyo (2012) juga mengemukakan tentang pariwisata pedesaan sebagai sebuah pemukiman yang memiliki fasilitas lingkungan yang sesuai dengan tuntutan dan tujuan para wisatawan untuk dapat menikmati, mengenal, serta menghayati keunikan dari suatu desa yang menjadi

daya tarik mereka dan juga terdapat tuntutan untuk menilik lebih lanjut terkait kegiatan hidup bermasyarakat.

Desa wisata menjadi salah satu dari bentuk pengembangan kegiatan alternatif pariwisata yang mana dalam prosesnya turut memperhatikan aspek keberlanjutan terhadap desa yang menjadi sasaran wisata yang dapat digambarkan melalui tradisi, kebudayaan, serta ciri khas suatu wilayah tersebut. Keberadaan desa wisata dapat menjadi produk wisata yang lebih bernilai budaya pedesaan sehingga dapat menikmati manfaat dari keindahan desa tanpa merusaknya. Maka dari itu, diperlukan pengembangan desa wisata yang yang diharapkan dapat dilakukan pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan (Dewi, n.d.). Pandangan lain mengenai desa wisata yaitu salah satu bagian dari pariwisata dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di sekitar kehidupan tradisional masyarakat maupun di desa-desa terpencil dan mereka mempelajari kehidupan yang berlangsung di desa serta lingkungan setempat (Inskeep, 1991).

Sedangkan menurut pandangan Joshi (2012), desa wisata merupakan kegiatan pariwisata di suatu desa yang terdiri atas sejumlah pengalaman pedesaan, tradisi, atraksi alam, serta unsur unik lainnya yang terdapat dalam desa tersebut dimana memiliki tujuan untuk menarik minat pengunjung. Dari sejumlah pandangan yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwasanya desa wisata merupakan wilayah di suatu pedesaan yang menekankan pada aspek keunikan, kekhasan, dan keaslian desa tersebut dimana menjadi suatu karakteristik yang ditekankan, seperti keaslian adat daerah, sosial budaya, kehidupan keseharian, ketradisional arsitekturnya, struktur tata ruang desa, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, karakteristik yang dimiliki berupa integrasi komponen pariwisata

yang mencakup atraksi, fasilitas pendukung, serta akomodasi.

Perlunya Pengembangan Desa Wisata Di Indonesia

Pengembangan desa wisata di Indonesia saat ini menjadi sektor prioritas dari pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah ditekankan untuk mengoptimalkan pengembangan wisata dan menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat daerah itu sendiri (Fandi, Zauhar and Hermawan, 2012). Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Selain itu, sektor wisata menjadi salah satu alternatif peluang keterbukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal (Zaenuri, 2018). Hal tersebut sejalan dengan ilustrasi yang diberikan oleh Bank Indonesia yang menggambarkan bahwa sektor pariwisata memiliki pengaruh dalam mendongkrak devisa negara. Hal tersebut dikarenakan sumber daya yang digunakan untuk pengembangan desa wisata di dalam negeri.

Community Development Dan Peran Serta Partisipasi Masyarakat Lokal

Community development dapat diartikan sebagai salah satu model praktik intervensi komunitas yang sangat memperhatikan aspek manusia dan pemberdayaan masyarakat yang mana terkandung didalamnya unsur upaya mengubah sejumlah aspek dalam suatu komunitas (Adi, 2013:147).

Peran masyarakat lokal dalam pengembangan masyarakat di desa wisata sangat penting dan menjadi unsur penggerak utama kegiatan. Hal tersebut dikarenakan sumber daya serta keunikan dari budaya dan tradisi yang melekat pada komunitas tersebut. komunitas lokal yang secara langsung hidup berdampingan dengan objek wisata turut menjadi bagian dari sebuah sistem ekologi yang saling berkorelasi satu sama lain. Wearing (2001)

memberikan kriteria keberhasilan pengembangan desa wisata dimana bergantung pada tingkat penerimaan serta dukungan masyarakat lokal di daerah tersebut. Masyarakat lokal memiliki peran sebagai tuan rumah dan pelaku penting dalam pengembangan desa wisata yang dapat dilihat dari seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga implementasi di lapangan. Dari pendapat Wearing (2001) dapat ditegaskan bahwasanya masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan stakeholders lainnya yaitu pemerintah dan pihak swasta sehingga masyarakat lokal perlu dilibatkan pada seluruh tahapan karena termasuk salah satu pemangku kepentingan dalam menerapkan pengembangan desa wisata di suatu daerah.

Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Adiyoso (2009) yang memaparkan bahwa partisipasi dari masyarakat menjadi komponen penting dalam proses pemberdayaan dan pertumbuhan kemandirian masyarakat desa wisata. Sebaliknya, pengabaian terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam upaya pengembangan desa wisata dapat menjadi pemicu awal gagalnya pencapaian tujuan pengembangan desa wisata (Nasikun, 1997).

Mengacu pada gagasan Timothy (1999) bahwa terdapat dua cara pandang dalam melihat partisipasi masyarakat di desa wisata, yaitu partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan serta partisipasi masyarakat lokal mengenai manfaat yang diterima dari pembangunan pariwisata. Atas dasar kedua ilustrasi tersebut, Timothy menekankan bahwa diperlukan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan salah satunya dengan mengakomodasi keinginan serta tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan desa wisata dan juga kemampuan mereka dalam mendapatkan manfaat dari adanya pengembangan desa wisata.

Pada pelaksanaan pengembangan masyarakat di desa wisata, masyarakat yang berada di wilayah pengembangan hendaknya didorong untuk mengidentifikasi tujuan mereka sendiri dan sebisa mungkin mengarahkan bahwa pembangunan desa wisata ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat disana. Selain itu, Timothy tidak mengesampingkan peran dari pemangku kepentingan lainnya seperti pihak pemerintah, swasta, dan organisasi yang ada untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan. pemangku kepentingan tersebut juga dapat menjadi sumber yang dapat dimanfaatkan terkait kebutuhan pendidikan serta pengetahuan mengenai kepariwisataan bagi masyarakat lokal di daerah desa wisata tersebut. perencanaan pengembangan desa wisata harus dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk memperoleh nilai manfaat secara optimal karena bagaimanapun masyarakat lokal berperan sebagai pemilik sumber daya pariwisata yang nantinya akan ditawarkan kepada pengunjung atau wisatawan.

Pendapat lainnya juga menjelaskan mengenai makna partisipasi yaitu sebagai sebuah kekuatan yang dimiliki masyarakat dan digunakan untuk mengatasi persoalannya yang dirasakan saat ini demi mencapai kondisi dan kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang (Arnstein, 1969). Ia juga memandang partisipasi sebagai upaya redistribusi kekuatan dimana dapat memberi kesempatan pada kaum terpinggirkan secara ekonomi dan politik untuk secara langsung dilibatkan dalam perencanaan pengembangan desa wisata (Arnstein, 1969).

Dalam pelaksanaan partisipasi, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan sampai tahap implementasi yang dapat diupayakan dengan melibatkan masyarakat dalam sharing informasi, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, mengalokasikan

sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program, dan juga mendistribusikan manfaat yang diperoleh.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis sumber-sumber literatur yang telah diterbitkan sebelumnya. Tujuan dari studi literatur adalah untuk memahami dan mensintesis pengetahuan yang telah ada dalam bidang tertentu, serta mengidentifikasi kekosongan pengetahuan yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Proses studi literatur melibatkan pencarian dan seleksi sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, kemudian membaca, memahami, dan mengkritisi isi dari sumber-sumber tersebut. Studi literatur dapat dilakukan dalam berbagai bidang penelitian dan topik, seperti ilmu sosial, ilmu alam, kesehatan, dan humaniora.

Penelitian jenis studi literatur atau studi pustaka dalam penerapannya biasanya akan digunakan dengan cara menyesuaikan sesuai dengan topik penelitian yang dibuat oleh penulis. Selain itu, penelitian jenis studi literatur atau studi kepustakaan bertujuan untuk menemukan celah atau kekurangan dan memberikan solusi dalam melaksanakan penelitian khususnya dalam pengumpulan data. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis yang menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan dapat memutuskan sebelum maupun pada saat penulis melakukan penelitian. Dan yang menarik dari penelitian jenis studi literatur atau studi kepustakaan adalah penelitian ini dilakukan dengan sistematis dan berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini juga menentukan atau menggali terlebih dahulu sumber informasi seperti apa yang akan digunakan

dalam penelitian. Agar memudahkan penulis biasanya cara yang dapat dipakai dalam penelitian jenis studi literatur atau studi pustaka adalah dengan mencari kata kunci, mencari subjek, mencari tulisan ilmiah yang terbaru, dan melacak referensi yang digunakan oleh penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Makna partisipasi menurut Arnstein (1969) adalah sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Partisipasi merupakan redistribusi kekuatan, yang memungkinkan kaum terpinggirkan secara ekonomi dan politik untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan masa depan. Makna partisipasi yang mengacu pada pendapat Arnstein adalah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Dengan demikian, perencanaan pembangunan pariwisata harus mengakomodasi keinginan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi serta memperoleh nilai manfaat yang maksimal dari pembangunan pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal sangat dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata karena masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek pembangunan.

Salah satu studi kasus di Desa Jatiluwih mengilustrasikan pentingnya partisipasi warga masyarakat dalam pengembangan desa. Desa Jatiluwih sebagai warisan

budaya dunia oleh UNESCO dinilai strategis terutama sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pelestarian sumber daya yang berbasis kekuatan nilai-nilai budaya yang ada, mendorong pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kenyataan di lapangan bahwa pembangunan belum berpihak kepada masyarakat Jatiluwih. Contohnya, sawah dan petani merupakan aset pariwisata yang dijual untuk kepuasan wisatawan. Namun karena kurangnya usaha untuk mengikutsertakan suara petani dalam usaha investor yang bertujuan *for profit*, keuntungan hanya dirasakan pada pihak investor yang membeli lahan dan jasa petani, sementara masyarakat petani tetap dalam keadaan tidak diuntungkan. Kondisi ini terjadi karena pengambil kebijakan membiarkan alam dan budaya dikorbankan demi kepentingan bisnis. Pembangunan Vila Petali menggambarkan bagaimana kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada kepentingan kelestarian alam dan budaya. Investor dapat membangun fasilitas wisata berupa villa di tengah hutan berdekatan dengan Pura Luhur Petali, sampai melanggar radius kesucian pura.

Literatur keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan model pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal dengan tujuan dapat meningkatkan akselerasi pengembangan desa wisata yang mampu merangkul semua pemangku kepentingan agar dapat berperan strategis dalam pengembangan desa wisata melalui model pembangunan berbasis masyarakat (*community based tourism-CBT*). Dari kajian dipahami pentingnya CBT, dimana peran masyarakat lokal sebagai stakeholder merupakan unsur terpenting dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat lokal diberdayakan untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan

mengarahkan pembangunan pariwisata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, stakeholder pemerintah, swasta, dan anggota masyarakat lainnya turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dan melihat pentingnya pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama dalam menerima manfaat pariwisata.

Karakteristik Objek dan Potensi Desa Wisata

Dalam upaya pengembangan potensi wisata desa salah satu metode yang dapat digunakan untuk melihat potensi sekaligus melaksanakan perencanaan dan pengembangan pariwisata yang penting dilakukan yaitu pemetaan objek wisata. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui persebaran objek wisata yang memiliki daya tarik pariwisata. Potensi wisata yang dimaksud dapat berupa sumber daya alam yang beraneka ragam dari aspek fisik dan hayati, serta kekayaan budaya manusia yang dapat dikembangkan sebagai atraksi pariwisata. Konstruksi pariwisata berbasis masyarakat ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (*growth oriented model*) yang seringkali mendapatkan banyak kritik karena telah mem marginalisasi masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi (Rahayu, Sugi, 2015). Literatur yang menggunakan metode ini adalah dalam penelitian Desa Wisata Sembungan. Tujuan penelitian ini untuk melihat potensi, melakukan perencanaan dan pengembangan pariwisata yang penting untuk dilakukan di Desa Sembungan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Desa Sembungan memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai daya tarik pariwisata. Desa ini telah dikembangkan dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat melalui Pokdarwis

(kelompok sadar wisata) namun masih memerlukan adanya pembenahan dari segi atraksi, keunikan wisata, serta sumber daya manusia. Selain itu diperlukan adanya pengembangan pada aspek pelayanan dan akomodasi, promosi, pengembangan industri dan pertanian, serta sarana transportasi. Walau keberadaan Pokdarwis di Desa Sembungan menunjukkan bahwa desa wisata tersebut menerapkan konsep *Community Based Tourism* dalam pengelolaan pariwisatanya, pengelolaan pariwisata Desa Sembungan masih cenderung fokus kepada daya tarik wisata alam dan sekedar mempekerjakan masyarakat setempat dan kurang berupaya memberdayakan masyarakat (Putri dan Manaf, 2013).

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Desa Wisata

Di antara artikel-artikel yang telah dibaca, penulis telah mengidentifikasi faktor pendukung yang umum dalam upaya pengembangan masyarakat di desa-desa wisata:

1. Peran aktif dan kesadaran masyarakat lokal; Peran aktif dan kesadaran masyarakat lokal diambil dalam studi kasus "**Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari**" dalam hal ini Keterlibatan masyarakat dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam mengelola Pulau Samalona. Peran masyarakat yaitu menyediakan sarana pariwisata dan melayani wisatawan. Masyarakat juga aktif turut serta dalam mengikuti berbagai kegiatan operasional pantai seperti budidaya terumbu karang dan menjaga kebersihan pantai.
2. Kerjasama pihak swasta yang mendukung pengembangan. Kerjasama pihak swasta yang mendukung pengembangan dalam studi kasus "**Peran Stakeholder**

Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari" dalam hal ini membantu dalam pengembangan wisata di Pulau Samalona. Seperti dalam hal aksesibilitas, terdapat usaha transportasi berupa perahu motor yang memudahkan wisatawan untuk mencapai pulau. Pihak swasta juga berperan dalam pengadaan akomodasi dan pemenuhan fasilitas yang ada di pulau. Pemenuhan fasilitas oleh pihak swasta berupa tempat ibadah serta pembuatan tanggul pemecah ombak dan budidaya terumbu karang sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan Pulau Samalona sebagai tempat wisata.

Selain faktor pendukung, ada pula sejumlah faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengembangan desa wisata, yaitu:

1. Pengetahuan masyarakat lokal tentang layanan jasa wisata dan pengelolaan lingkungan masih kurang. dilihat dalam artikel "**Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari**" bahwasanya Pulau Samalona masih dikelola secara sederhana oleh masyarakat lokal karena pengetahuan masyarakat tentang pariwisata masih sangat terbatas terutama tentang wisata bahari. Kemampuan masyarakat (soft skill) sebagai pelaku pariwisata masih sangat kurang seperti kemampuan berbahasa asing dan pertunjukan kebudayaan, pelayanan prima, dan pengetahuan tentang wisata bahari. Masih rendahnya peran serta masyarakat akan sadar wisata dan sapta pesona merupakan salah satu kendala bagi pengembangan Pulau Samalona.
2. Peran Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (pemerintah) masih kurang dilihat dalam artikel "**Peran**

Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari"

bahwasanya Sarana prasarana pariwisata yang ada di Pulau Samalona belum terpenuhi dengan baik seperti air bersih yang harus diusahakan sendiri oleh masyarakat. Ketersediaan listrik juga masih terbatas hanya beroperasi pada pukul 18.00-22.00 WITA. Sarana komunikasi nirkabel yang tersedia hanya satu jaringan operator yaitu Telkomsel. Belum tersedia fasilitas kesehatan dan keselamatan yang memadai di Pulau Samalona. Selain beberapa sarana prasarana yang masih perlu dibenahi, sumber daya manusia yaitu masyarakat lokal Pulau Samalona masih harus ditingkatkan.

3. Kerjasama dan koordinasi antar stakeholder pariwisata masih kurang dilihat dalam artikel "**Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari"** bahwasanya Kerjasama dan koordinasi antara stakeholder pariwisata dalam pengembangan Pulau Samalona masih kurang, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, maupun pemerintah dan pihak swasta. Pertama, antara masyarakat dan pihak pemerintah yaitu Disparekraf yang mengalami kesulitan dalam mengarahkan dan memberi pemahaman tentang sadar wisata kepada masyarakat lokal Pulau Samalona. Kedua, antara masyarakat dan pihak swasta yaitu tidak ada kemitraan antara pihak swasta dan masyarakat yang mendorong jiwa kreatifitas dan kewirausahaan masyarakat. Ketiga, antara pemerintah dan pihak swasta yaitu tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya disparekraf untuk

menertibkan pemilik perahu motor yang rebutan penumpang di Dermaga Popsa.

Kriteria Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata mengacu pada beberapa kriteria, diantaranya terdapat ketersediaan destinasi wisata serta objek wisata yang berdekatan dalam desa tersebut. Hal ini dapat menjadi indikator utama yang menjadikan eksistensi dari suatu daerah. hal tersebut dapat meningkatkan minat pengunjung bila terdapat potensi wisata yang menarik perhatian dan unik. Kriteria berikutnya yaitu kemudahan aksesibilitas terhadap fasilitas dan pemasaran. Kemudahan akses dapat mempengaruhi ketertarikan kunjungan wisatawan. Apabila suatu desa memiliki akses yang memadai dan memudahkan untuk diakses, maka wisatawan pun tidak memiliki keraguan untuk datang ke desa tersebut. kemudahan akses disini perlu dipertimbangkan dalam pengembangan desa wisata yang mana dapat dimanfaatkan untuk membangun kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam pengembangan desa wisata, kemitraan nampaknya diperlukan untuk membantu eksistensi di dunia luar melalui kerjasama dengan suatu organisasi pariwisata yang aktif di media sosial. Salah satunya dapat dilihat dari penelitian oleh Prihasta et.al., (2020) mengenai pengembangan wisata Desa Kaki Langit dimana masyarakat desa berkolaborasi dan membangun kemitraan dengan organisasi Generasi Pesona Indonesia (GENPI) region Jogja yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal tersebut dilakukan karena melihat keterbatasan masyarakat desa tersebut dalam penggunaan teknologi dan sosial media.

Dalam implementasi program pengembangan masyarakat di desa wisata, masyarakat perlu diberikan keleluasaan untuk dapat mengembangkan dan mengelola unit kegiatannya. Hal ini juga

sesuai dengan asumsi fundamental dari pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Murray (1967) bahwa masyarakat perlu berpartisipasi dalam membuat, menyesuaikan, dan mengendalikan perubahan penting yang terjadi dalam komunitas dan kegiatannya. Keterlibatan masyarakat menjadi suatu komponen penting dari timbulnya antusiasme dan perasaan memiliki program yang ada pada diri masyarakat. Selain daripada itu, pengembangan desa wisata hendaknya memperhatikan beberapa prinsip perencanaan desa wisata, diantaranya karakteristik lingkungan setempat, dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan, materi yang digunakan apakah sesuai dengan keadaan lingkungan setempat, pihak-pihak yang dilibatkan, partisipasi masyarakat lokal, dan sebagainya (Arida and Pujani, 2017).

Pembagian Peran Internal dan External

Dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata perlu dilakukan pembagian peran pelaksanaan menjadi peran internal dan peran external. Dengan adanya pembagian peran, sebuah komunitas akan lebih merasa kepemilikan terhadap upaya pengembangan dan lebih bertanggung jawab atas pemberdayaan diri mereka. Desa Wisata Kembangarum beserta kegiatan agrowisatanya pertama melakukan pembagian peran internal pada anggota masyarakat desa. Pembagian peran disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh setiap kelompok-kelompok dalam masyarakatnya, yakni dilakukan berdasarkan analisis pemetaan kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas dari setiap kelompok untuk dapat berkontribusi secara nyata dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Kembangarum ini.

Selain dari pemeran internal, terdapat pula pemeran eksternal yang turut mengembangkan dan membantu pengimplementasian kegiatan-kegiatan agrowisata di Desa Wisata Kembangarum.

Aktor-aktor ini meliputi pemerintah dari tingkat desa hingga pusat. Perannya pun berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kelebagaannya. Aktor dari pihak pemerintah ini membantu implementasi kegiatan agrowisata di Desa Wisata Kembangarum ini dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan bantuan dana pengembangan.

Pemanfaatan *stakeholder* untuk pengembangan desa wisata

Dalam implementasi pengembangan desa wisata di suatu wilayah, terlebih dahulu menentukan *stakeholder* yang ikut terlibat dalam proses pengembangan desa wisata. *Stakeholder* dapat diartikan sebagai suatu individu, kelompok, maupun organisasi yang memiliki sejumlah kepentingan di dalam kegiatannya, terlibat langsung, ataupun dipengaruhi (baik pengaruh positif maupun negatif) oleh suatu kegiatan atau program pengembangan desa wisata (Hetifah, 2003). Masing-masing pemangku kepentingan mempunyai sejumlah peran tertentu dan saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga apabila dalam implementasinya berjalan dengan baik, maka akan pengembangan objek serta daya tarik desa wisata dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam upaya pengembangan masyarakat, terdapat tiga *stakeholder* utama yang terlibat dalam kegiatan atau program, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam praktiknya, pemangku kepentingan terakhir belum banyak dilibatkan dalam setiap tahapan pengembangan masyarakat. Maka dari itu, tulisan ini menekankan pada keterlibatan masyarakat sebagai pemilik, pengelola, serta bagian penting dari kegiatan yang dilakukan di desa wisata. Hal tersebut dilakukan atas dasar masyarakat lokal yang paling mengerti mengenai kondisi, potensi dan hambatan yang dimiliki, serta

keunikan dan ciri khas dari wilayahnya tersebut.

Indikator Penilaian Kapasitas Pengorganisasian Komunitas dalam Pengembangan Desa Wisata

Indikator penilaian kapasitas pengorganisasian komunitas dalam pengembangan desa wisata Karakteristik pariwisata di Desa Sembungan, berdasarkan indikator pariwisata berkelanjutan, menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan perbaikan yang signifikan guna mencapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti atraksi wisata, keunikan wisata, dan sumber daya manusia. **Pertama**, dari segi atraksi wisata, Desa Sembungan perlu meningkatkan dan memperkaya ragam atraksi wisata yang ditawarkan kepada pengunjung. Hal ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi potensi atraksi yang ada di desa tersebut, baik berupa keindahan alam, budaya lokal, maupun keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata. Dengan menawarkan atraksi yang beragam dan menarik, Desa Sembungan dapat menarik minat pengunjung untuk datang dan menghabiskan waktu di desa tersebut. **Kedua**, keunikan wisata menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Sembungan. Desa ini perlu memperkuat dan melestarikan keunikan lokalnya, seperti adat istiadat, tradisi, atau kerajinan tangan khas desa. Pengembangan dan promosi keunikan wisata ini akan membantu Desa Sembungan membedakan dirinya dari destinasi wisata lainnya, menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman unik dan otentik, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. **Ketiga**, sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Desa Sembungan perlu melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata dan memberikan

pelatihan serta peningkatan keterampilan kepada mereka. Dengan melibatkan masyarakat lokal, Desa Sembungan dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di desa untuk menjadi pemandu wisata, pelaku usaha pariwisata, atau tenaga kerja di sektor pariwisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, karakteristik pariwisata di Desa Sembungan, berdasarkan indikator pariwisata berkelanjutan, menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal atraksi wisata, keunikan wisata, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Dengan melakukan pembenahan di bidang-bidang tersebut, Desa Sembungan dapat mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan daya tarik wisata, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pariwisata berkelanjutan menjadi fokus utama dalam pengembangan destinasi pariwisata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kepentingan masyarakat, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Pariwisata domestik di Indonesia telah mengalami pemulihan setelah terkena dampak pandemi COVID-19, namun pemulihan tersebut masih terpusat di Pulau Jawa. Dalam konteks globalisasi budaya, penting untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal. Globalisasi dapat mempengaruhi budaya lokal dan menyebabkan krisis identitas. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat perlu memperhatikan pelestarian budaya asli dan memitigasi komodifikasi dan

komersialisasi berlebihan terhadap budaya. Sektor pariwisata di Indonesia telah terkena dampak yang signifikan akibat pandemi COVID-19, dengan penurunan kunjungan wisman dan dampak ekonomi yang meluas. Namun, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan sektor pariwisata, seperti pengembangan desa wisata, bantuan ke pelaku usaha pariwisata, dan peningkatan standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan desa wisata merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat setempat. Desa wisata menggabungkan atraksi wisata dengan kehidupan masyarakat lokal yang berbasis budaya dan tradisi, sehingga memberikan nilai tambah pada produk pariwisata tanpa merusak nilai budaya. Untuk mencapai keberlanjutan pariwisata dan kesejahteraan budaya, perlu dilakukan upaya perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kualitas produk pariwisata. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata perlu bekerja sama dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang.

Pandangan beberapa ahli yang sudah digambarkan sebelumnya memberikan kesimpulan yang jelas bahwasanya pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, aspek partisipasi menjadi isu yang paling mendasar dan dapat berdampak pada hasil yang akan diperoleh nantinya. partisipasi masyarakat lokal dilihat sebagai awal pijakan yang berpengaruh terhadap dampak strategis terkait pengembangan desa wisata untuk menciptakan desa wisata yang berkelanjutan dan juga berkualitas. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat menjadi variabel penting terutama saat meyakini bahwa masyarakatlah yang paling

mengetahui kondisi mereka sendiri dan apa yang mereka butuhkan. partisipasi masyarakat yang baik haruslah termanifestasi dalam setiap tahapan mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengawasan program pengembangan desa wisata. keikutsertaan dari masyarakat juga dapat membuat masyarakat merasa memiliki program tersebut dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan desa wisata.

Walaupun pengembangan masyarakat melalui pariwisata berbasis masyarakat telah diusahakan, berbagai tantangan terus menghambat kemajuan. Salah satu kendala yang signifikan adalah kurangnya ketelitian dari pemerintah, yang seringkali mengakibatkan keterbatasan sumber daya dan memungkinkan praktik praktik usaha pencarian untung ekonomi yang justru tidak menguntungkan masyarakat lokal. Selain itu, konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan, termasuk penduduk lokal, operator pariwisata, dan lembaga pemerintah, dapat menimbulkan ketegangan dan menghambat kelancaran pelaksanaan proyek pariwisata berbasis masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting untuk mendefinisikan kembali kepentingan dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Alih-alih hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, harus ada pergeseran ke arah pendekatan yang lebih holistik yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan dari pengembangan masyarakat. Redefinisi kepentingan ini harus menekankan praktik berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pelestarian warisan alam dan budaya. Selain itu, mengoptimalkan saluran komunikasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk kolaborasi yang efektif dan resolusi konflik. Dialog yang teratur dan transparan harus didorong untuk mendorong pemahaman, mengatasi masalah, dan menemukan titik temu. Hal

ini dapat dicapai melalui proses pengambilan keputusan yang inklusif, forum partisipatif, dan pembentukan struktur pemerintahan lokal yang menjamin keterwakilan semua pemangku kepentingan. Selain itu, nilai-nilai usaha wisata desa mesti didefinisikan kembali untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan komunikasi di antara para pemangku kepentingan, inisiatif pariwisata berbasis masyarakat dapat mengatasi tantangan dan menciptakan kerangka pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian warisan budaya, perlindungan lingkungan, dan keberhasilan prakarsa pariwisata dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2015). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*.
- Adiyoso, W. (2009). *Menggugat perencanaan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat*. Pmn.
- Andini, N. (2013). Pengorganisasian komunitas dalam pengembangan agrowisata di desa wisata studi kasus: desa wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 24(3), 173-188.
- Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. (2016). *Peran stakeholder pariwisata dalam pengembangan Pulau Samalona sebagai destinasi wisata bahari*. Brawijaya University.
- Budiani, S. R., Wahdaningrum, W., Yosky, D., Kensari, E., Pratama, H. S., Mulandari, H., ... & Kusmiati, Y. (2018). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah. *Majalah Geografi Indonesia*, 32(2), 170-176.
- Budiarti, T., & Muflikhati, I. (2013). Pengembangan agrowisata berbasis masyarakat pada usahatani terpadu guna meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sistem pertanian. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 18(3), 200-207.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).
- Fandi, K., Zauhar, S. and Hermawan 2012 'Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), pp. 47-55.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355-369.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat: Sebuah pendekatan konsep*. Graha Ilmu.
- Inskeep, E. 1991. *Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world*. Cambridge University Press.
- Indardi 2016 *Komunikasi pemberdayaan masyarakat*. Edited by W. Nadeak et al. Bandung: UNPAD Press.
- Ira, W. S., & Muhamad, M. (2020). Partisipasi masyarakat pada penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan (studi kasus desa wisata pujon kidul, kabupaten malang). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), 124-135.
- Krisnani, H., & Darwis, R. S. (2010). perkembangan desa wisata melalui konsep community based tourism. *Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 341-346.
- Musthofa, B. M. (2018). Pengembangan Budaya Menuju Kesejahteraan Budaya: Pelajaran Dari Pengembangan Masyarakat Di Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 4(3).

Prihastha, A. K., & Suswanta, S. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7(1), 221-240.

Timothy, D. J. (1999). Participatory planning A view of tourism in Indonesia. *Annals of tourism research*, 26(2), 371-391.

Wearing, S.L. and Donald, Mc. 2001. "The Development of Community Based Tourism: Re-Thinking The Relationship between Tour Operators and Development Agents as intermediaries in rural and isolated area Communities." *Journal of Sustainable Tourism*.

Zaenuri, M. (2018). *Tata kelola pariwisata-bencana berbasis collaborative governance: konsep, analisis, dan pemodelan*. Explore.